

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA**

*(Studi Kasus : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara*

*Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*

**Oleh:**

**BAHRI ADANG SALHASIM**

**NIM: S2118018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan  
Gorontalo Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

# STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (*Studi Kasus : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*)

Oleh :

BAHRI ADANG SALHASIM

NIM: S2118018

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Telah Disetujui Dan Siap Diseminarkan  
Gorontalo....., 2022

## PEMBIMBING I

**Dr. Fatmah M. Ngabito, S.I.P, M.si**  
NIDN : 0927128301

## PEMBIMBING II

**Balada RAF, S.Sos.,M.Si**  
NIDN : 0927076704

## Mengetahui



## HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

### STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA

(*Studi Kasus : Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara  
Tahun 2020 Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*)

Oleh:

**BAHRI ADANG SALHASIM**  
**S2118018**

Telah Dipertahankan Dihadapan Penguji

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**Universitas Ichsan Gorontalo**

1. Dr. Fatmah M. Ngabito S.IP., M.Si :.....
2. Balada Raf, S.IP., M.Si :.....
3. Marten Nusi, S.IP., M. AP :.....
4. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si :.....
5. Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP :.....

Mengetahui



**Dr. Arman, S.Sos., M.Si**  
NIDN: 0913078602



**Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP**  
NIDN: 0924076701

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Bahri Adang Salhasim  
NIM : S2118018  
KONSENTRASI : Ilmu Politik  
PROGRAM STUDI : Ilmu Pemerintahan  
JUDUL : Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam  
Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi  
Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang  
Mongondow Utara)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan bersungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



Gorontalo, Mei 2022

Bahri Adang Salhasim

S2118018

## ABSTRAK

**BAHRI ADANG SALHASIM : NIM. S2118018. STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (STUDI KASUS: PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2) faktor penghambat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melelui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Komisioner divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; pemilih pemula; mahasiswa; relawan demokrasi; tokoh pemuda; dan siswa SMA. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi; wawancara; dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula cukup efektif. Hal ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh informan tentang tahap penyusunan strategi yang terdiri dari formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya walaupun ada beberapa kendala yang menghambat partisipasi tersebut seperti kesibukan kegiatan sehari-hari, pengaruh lingkungan keluarga dan perasaan tidak mampu.

**Kata Kunci :** Strategi, KPU, Partisipasi, Pemilih Pemula

## ***ABSTRACT***

### ***BAHRI ADANG SALHASIM. S2118018. THE STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN INCREASING THE BEGINNER VOTER PARTICIPATION (A CASE STUDY: 2020 ELECTION OF GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF NORTH SULAWESI IN THE NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT)***

*This study aims to determine 1) the strategy of the General Elections Commission in increasing the Beginner Voters' participation in the 2020 North Sulawesi Governor and Vice Governor Elections in North Bolaang Mongondow District, 2) the inhibiting factors for the Beginner Voters' participation in the 2020 North Sulawesi Governor and Vice Governor election in the North Bolaang Mongondow District. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive presentation. The informants in this study consist of the chairman of the General Election Commission for North Bolaang Mongondow District, Commissioner of the Division of Socialization, Voter Education, Community Participation, and Human Resources, covering beginner voters (students, democracy volunteers, youth leaders, and high school students). Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. In this study, interactive analysis is used. The results of this study indicate that the strategy used by the General Election Commission in increasing the Beginner Voters' participation is quite effective. It is proven by the informants' opinions expressed about the strategy formulation stage consisting of formulation and long-term goals, selection of actions, and allocation of resources. Though so, several obstacles hinder their participation, such as busy daily activities and the influence of the family environment, and feelings of inadequacy.*

***Keywords:*** *Strategy, General Election Commission, Participation, Beginner Voters*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.”*

**(Albert Camus)**

**“Lakukan yang terbaik”**

**(Bahri Adang Salhasim)**

### **Karya Ini Dipersembahkan Untuk :**

Kedua orang tua saya : Bapak Warman Adang Salhasim dan Ibu Karsum Abusaman, dua sosok penuh kasih yang selalu membimbing dan mendoakan saya selama ini.

Seluruh sanak keluarga yang memberikan dukungan moral dan materil serta mendukung saya dalam segala hal.

Sahabat-sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018

Serta seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini

Dan

**KELUARGA BESAR & ALMAMATER**  
**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat izin dan kuasaNya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)”**. Tak lupa pula sholawat serta salam sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan sesuai rencana. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih.

Kedua orang tua tercinta, Bapak Warman Adang Salhasim dan Ibu Karsum Abusaman yang begitu ikhlas dan sabar membimbing dan mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini.

Ibu Dr.Hj. Juriko Abdussamad. M.Si, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.

Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

Bapak Dr. Arman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Ibu Darmawaty Abdul Rajak, S.Ip.,M.Ap, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Ibu Dr. Fatmah M. Ngabito, selaku pembimbing Satu yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing anak didiknya ditengah begitu banyak kesibukan yang dihadapi.

Bapak Balada RAF, S.Sos.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah membantu memberikan masukan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melaksanakan studi di Universitas Ichsan Gorontalo.

Teman-teman Angkatan 2018 Jurusan Ilmu Pemerintahan yang banyak memberikan dukungan moril kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Bapak Djunaidi Harundja selaku ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang membantu penulis selama melakukan penelitian.

Ibu Rita Sophia Darondo selaku Komisioner divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Semua teman-teman asrama: Dandi, Iki, Ipan, Elsa, Ninda, Wawan yang menjadi teman senasib sepenanggungan.

Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

*Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no*

*days off, I wanna thank me for never quit, I wanna thank me for always being a  
giver and tryna give more than i receive and I wanna thank me for tryna do more  
right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Kritik dan saran penulis harapkan dari seluruh pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk studi yang berkaitan dan dapat menjadi rujukan bagi pihak lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua.

Gorontalo, Mei 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING** .....Error! Bookmark not defined.

**HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI** .....Error! Bookmark not defined.

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....                      | iii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                | v    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                               | vi   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                  | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                         | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                             | xi   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                      | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                            | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                           | 7    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                          | 7    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                         | 7    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                | 9    |
| 2.1 Konsep Strategi .....                           | 9    |
| 2.2 Partisipasi Politik.....                        | 19   |
| 2.3 Pemilih Pemula.....                             | 27   |
| 2.4 Kerangka Pemikiran .....                        | 28   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....              | 29   |
| 3.1 Objek dan Waktu Penelitian .....                | 29   |
| 3.2 Jenis Penelitian .....                          | 29   |
| 3.2.1 Desain Penelitian .....                       | 29   |
| 3.2.2 Fokus Penelitian.....                         | 30   |
| 3.2.3 Informan Penelitian.....                      | 31   |
| 3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....                    | 32   |
| 3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....                  | 33   |
| 3.2.6 Analisis Data.....                            | 34   |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> ..... | 36   |

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1 Karakteristik Objek Penelitian .....                                                                                      | 36        |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....                                                                    | 36        |
| 4.1.2 Luas dan Batas Wilayah .....                                                                                            | 37        |
| 4.1.3 Visi dan Misi.....                                                                                                      | 38        |
| 4.1.4 Deskripsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara<br>Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ..... | 39        |
| 4.1.5 Komisi Pemilihan Umum (KPU).....                                                                                        | 40        |
| 4.2 Hasil Penelitian.....                                                                                                     | 46        |
| 4.2.1 Stategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi<br>Pemilih Pemula .....                                    | 47        |
| 4.2.2 Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula .....                                                              | 55        |
| 4.3 Pembahasan .....                                                                                                          | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                    | <b>63</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                           | 63        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                               | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                   | <b>65</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                               |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi pada dasarnya merupakan sistem politik yang menekankan pada persamaan hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, serta pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Demokrasi dengan berbagai dinamikanya terbukti merupakan sistem politik yang paling banyak diterapkan di seluruh dunia. Kita mengenal idiom *one person, one vote, one value* yang diimplementasikan dalam pemilu dimana setiap orang memiliki satu hak suara, artinya bahwa demokrasi tidak menjadikan stratifikasi sosial dalam masyarakat sebagai tolak ukur hak partisipatif melainkan kebebasan dan kesetaraan setiap orang untuk menentukan pilihan politiknya sendiri.

Dalam buku *introduction to democratic theory*, Henry B. Mayo mengungkapkan bahwa sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik (Budiarjo, 2008).

Pemilu menjadi salah satu fitur utama dalam demokrasi, utamanya ketika menyangkut persoalan partisipasi politik, pemilu menjadi tolak ukur apakah hak konstitusional dalam hal ini adalah hak untuk berpartisipasi dapat terdistribusi dengan baik. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan

seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiarjo, 2008).

Pada hakikatnya, pemilihan umum merupakan sarana terlaksananya kedaulatan rakyat sebagaimana prinsip dari demokrasi itu sendiri. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih secara adil, tidak lain merupakan pengejawantahan dari terciptanya iklim demokrasi yang ideal. Pemerintah sendiri memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara serta menjamin terciptanya kedaulatan rakyat melalui hak suara. Sebab bukan hal yang aneh ketika elegansi dari demokrasi tercoreng akibat dari ulah segelintir orang yang menjadikan pemilu sebagai jalan untuk meperoleh profit kekusaan demi keuntungan pribadi dan bukan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kesepakatan umum menyatakan bahwa berlangsunya partisipasi politik yang dilakukan oleh anggota masyarakat ditentukan beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satu dari faktor-faktor tersebut dan merupakan faktor yang relatif dominan adalah sikap elit politik terhadap sifat partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakatnya. (Haryanto, 2017).

Pemilu di Indonesia sendiri dikenal dengan asas LUBER yang merupakan akronim dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Adanya kebebasan dalam asas

ini artinya bahwa masyarakat pada dasarnya bebas pula menentukan untuk ikut atau tidak dalam penyelenggaraan pemilu. Namun mengingat partisipasi merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu, maka semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilu adalah indikasi bahwa konstelasi demokrasi berjalan dengan baik, hal ini juga berjalan secara simultan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*).

Dalam proses pelaksanaannya, pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong partisipasi rakyat. Diantaranya adalah tumpang tindih peraturan, pengetahuan pemilih, pemetaan stakeholder, penjadwalan tahapan pemilu, dan luasnya wilayah. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi penting melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat (Hafidz, 2019).

Berdasarkan pemahaman bahwa partisipasi politik tidak hanya sekadar memberikan hak suara pada saat pemilu, sehingga setinggi apapun persentase penggunaan hak suara dalam pemilu tanpa dibarengi kesadaran (*awareness*) politik, serta pengawasan terhadap berbagai macam kemungkinan kecurangan dari pemilu, kualitas dari pemilu yang hakikatnya merupakan pengejawantahan dari pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat hanyalah sebatas acara yang sifatnya seremonial belaka.

Oleh sebab itu partisipasi politik dalam pemilu tidak bisa hanya ditafsirkan secara *superfisial* sebab jelas bahwa dalam dinamika politik khususnya di Indonesia, berbagai macam kendala dan masalah seringkali ada di sekeliling kita,

mulai dari pengawasan terhadap berlangsungnya penyelenggaraan pemilu yang terkadang kurang optimal, serta wawasan politik masyarakat yang kurang hingga berimbang pada minimnya partisipasi masyarakat.

Karena itu, bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dapat diperluas. Penggunaan hak pilih, pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu, pemantauan atas pelaksanaan setiap tahapan pemilu, dan pemberitahuan atas seluruh tahapan pemilu melalui media cetak dan elektronik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilih, lembaga pemantau pemilu, peserta pemilu, wartawan, dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya merupakan sejumlah unsur masyarakat yang dapat dan perlu berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. (Ramlan & Didik,2013).

Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat serta kebijakan dan strategi yang tepat oleh pemerintah dan birokrasi. Pemerintah sebagai *leading service* memegang peran sentral dalam melaksanakan strategi untuk memobilisasi sekaligus mengedukasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berorientasi pada peningkatan partisipasi serta kesadaran politik masyarakat.

Berdasarkan tugas KPU dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Oleh karena itu sudah seyogyanya KPU melaksanakan strategi yang efektif untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sosialisasi menjadi cara yang ampuh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti petunjuk teknis, serta pendidikan politik agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan tepat.

Pada pemilihan kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 khusunya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada penyelenggaraan pilgub Sulawesi Utara tahun 2020. Sosialisasi seperti ini penting untuk mengedukasi masyarakat apalagi mengingat dari seluruh daftar pemilih tetap di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagian merupakan pemilih pemula yang baru akan menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilihan gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang pada pilgub Sulawesi Utara tahun 2015 hanya 66,2% pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 meningkat menjadi 78,3% yang bahkan melampaui target nasional partisipasi pemilih yang memasang persentase 77,5%. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah tinggi.

Menurut undang-undang No 10 tahun 2008 Bab IV Pasal 19 ayat 1 dan 2, serta pasal 20, pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan

atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak memilih.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula merupakan warga negara yang belum memiliki pengalaman menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban KPU dalam memberikan sosialisasi serta edukasi politik yang benar terhadap warga negara yang teridentifikasi sebagai pemilih sebagai usaha meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan investigasi awal penulis, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menghitung tingkat partisipasi segmen pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, tentu hal penting tersebut perlu untuk dipertimbangkan kembali guna mengukur efisiensi dari strategi yang digunakan, mengingat preferensi politik pemilih pemula yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan sekitar, kurang mengenal publik figur calon, berkurangnya kepercayaan pemilih pemula kepada pemerintah, perilaku tendensius dalam penyelenggaraan pemilu ini sangat sering terjadi karena masyarakat terkhusus pemilih pemula masih sulit menentukan preferensi politik secara objektif berdasarkan pertimbangan nalar serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneletian dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula”** (*Studi kasus : Pemilihan Gubernur Sulut tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di kabupaten bolaang Mongondow Utara?
2. Apa saja faktor penghambat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai studi manajemen strategi serta partisipasi politik khususnya dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi instansi terkait serta menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian serupa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Strategi

Strategi merupakan sebuah langkah perencanaan serta pelakasnaan berbagai gagasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi adalah bentuk improvisasi dari tujuan atau visi dan misi suatu instansi tertentu berdasarkan pengamatan realitas objektif sehingga eksekusi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *stratv* yang berarti tentara serta *agein* yang berarti untuk memimpin. Sun Tzu dalam bukunya *the art of war* (1997) juga membahas tentang pentingnya strategi dalam hubungannya dengan tugas seorang pemimpin: “hanya seorang penguasa yang brilian dan pemimpin yang hebat, yang mampu menjalankan kecerdasan dan kecerdasan-kecerdasan mereka pasti akan mencapai hasil yang bagus”.

Menurut Ahmad S. Adnan Putra, strategi adalah bagian dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari perencanaan yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari fungsi manajemen. Maka strategi itu pada hakikatnya adalah suatu perenjanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam taktik operasionalnya. (Rosady,2000).

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain definisi-definisi strategi yang sifatnya umum, ada juga yang lebih khusus, Hamei

dan Prahalad (1995), yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal yang penting.

Mereka berdua mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai berikut :

“Strategi merupakan tindakan incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies)”.

Strategi disusun hakikatnya untuk membentuk respon terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi. Sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dari luar untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan mendayagunakan keunggulan organisasi yang dimiliki.

Ketidakmampuan atau ketidakpedulian untuk melihat perubahan lingkungan eksternal ini akan membuat *shock* organisasi, sehingga strategi berguna untuk menjaga, mempertahankan, meningkatkan kinerja serta keunggulan bersaing dari suatu organisasi (Pearce and Robinson, 1996). Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa organisasi yang mempunyai strategi yang jelas/formal, lebih unggul (*outperformed*) kinerjanya dibandingkan dengan organisasi tanpa/tidak terformulasi dengan jelas strateginya (Rahman & Enny, 2017).

Kenichl Ohmae (Wahyudi, 1996) membandingkan tiga macam proses berfikir yaitu berfikir secara mekanik, intuisi dan strategik. Dari ketiganya dapat disimpulkan bahwa berfikir strategik akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada hanya berfikir secara mekanik dan intuisi. Dengan semakin kreatif dalam memecahkan masalah, maka akan semakin kecil tingkat kesalahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang dan hal ini akan membuat keuntungan bagi si pembuat keputusan.

Berfikir strategik memerlukan beberapa tahapan yaitu:

a. Identifikasi masalah

Pada tahap awal ini, diharapkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dengan cara melihat gejala-gejala yang ada.

b. Pengelompokan masalah

Pada tahap ini, kita diharapkan bisa mengelompokkan masalah-masalah sesuai dengan sifatnya agar memudahkan pemecahannya.

c. Proses abstraksi

Pada tahap ini, kita diharapkan mampu menganalisis masalah-masalah dengan mencari faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu, kemudian kita dituntut lebih teliti untuk dapat menyusun metode pemecahannya.

d. Penentuan metode/cara pemecahannya dan,

Pada tahap ini kita diharapkan mampu menentukan metode yang paling tepat untuk penyelesaian masalah.

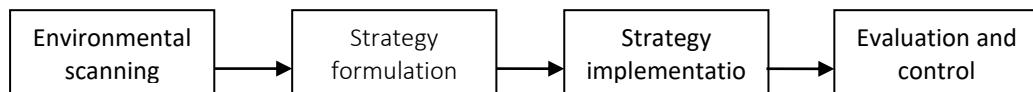
e. Perencanaan untuk implementasi

Pada tahap yang akhir ini, kita dituntut untuk bisa menerapkan metode yang telah ditetapkan.

Persoalan tentang strategi tidak pernah terlepas dari manajemen strategi, yang dimana didalamnya memuat tentang formulasi, implementasi, serta evaluasi guna memungkinkan suatu instansi mencapai tujuannya.

Elemen dasar dari manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2003: 8) adalah :

1. *Environmental scanning*
2. *Strategy formulation*
3. *Strategy implementation*
4. *Evaluation and control*



*Gambar 1. Elemen dasar manajemen strategi Wheelen dan Hunger (2003:8)*

1. Pemindaian lingkungan (*environmental scanning*)

Pemindaian lingkungan adalah memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang-orang penting dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis elemen eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan perusahaan. Penyusunan strategi, khususnya perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang biasanya berkaitan dengan visi, misi dan kebijakan suatu instansi. Biasanya penyusunan strategi dimulai dengan melakukan analisa situasi untuk mendapatkan kesesuaian antara peluang eksternal dan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan kelemahan internal.

Salah satu yang paling sering digunakan dalam analisa situasi adalah analisa SWOT. SWOT merupakan singkatan dari *strength* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) internal dari suatu instansi, serta *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) dalam lingkungan yang dihadapi suatu instansi. (Hunger dan Wheelen, 2006, p. 138).

Analisa SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisa SWOT bukan hanya mengidentifikasi kompetensi (kemampuan dan sumber daya) yang dimiliki perusahaan, tetapi juga mengidentifikasi peluang yang belum dilakukan oleh perusahaan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang handal.

Adapun penjelasan yang lebih rinci dari masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Kekuatan (*strengths*) : kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan keunggulan yang lain, relative terhadap pesaing dan kebutuhan dasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah modal utama suatu instansi.

- 2). Kelemahan (*weaknesses*) : kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif suatu instansi.
- 3). Peluang (*opportunities*) : peluang adalah suatu situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan instansi. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang.
- 4). Ancaman (*threats*) : ancaman merupakan penghambat utama bagi posisi sekarang maupun yang diinginkan suatu instansi.

## 2. Perumusan strategi (*strategi formulation*)

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungandilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Setelah mengetahui yang menjadi ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan, maka selanjutnya kita dapat menentukan atau merumuskan strategi perusahaan.

Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

### a. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan kenapa organisasi tersebut berdiri atau ada. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik, mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang membedakan suatu perusahaan dan perusahaan lain, dan mengidentifikasi jangkauan

operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Misi mengembangkan harapan dari karyawan dan mengkomunikasikan pandangan umum kelompok.

b. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi.

c. Strategi

Strategi ada yang dinamakan strategi eksplisit atau strategi yang dinyatakan, yaitu strategi yang dengannya beberapa hal dapat diperdebatkan, serta strategi implisit yang dapat berasal dari kebijakan perusahaan, program-program yang disetujui (dan tidak disetujui) dan anggaran yang telah disahkan.

d. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya sendiri, yang akan menjadi pedoman wilayah fungsionalnya untuk diikuti.

### 3. Implementasi strategi (*strategy implementation*)

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur dan atau system manajemen dari organisasi secara keseluruhan.

#### a. Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari suatu usaha penelitian baru.

#### b. Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan proforma yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan perusahaan.

#### c. Prosedur

Prosedur atau yang sering disebut dengan *standart operating procedures (SOP)* adalah system langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci

berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program perusahaan.

#### 4. Evaluasi dan kontrol (*evaluation and control*)

Evaluasi dan kontrol mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh perusahaan. Hal ini berarti membandingkan antara kinerja perusahaan dengan hasil yang diharapkan perusahaan. Kinerja adalah hasil akhir dari aktivitas. Ukuran apa yang dipilih untuk mengukur kinerja tergantung pada unit organisasi yang akan dinilai dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang telah dibuat lebih dulu pada bagian formulasi strategi dari proses manajemen strategik (seperti profitabilitas, pangsa pasar, pengurangan biaya dan sebagainya) harus digunakan semestinya untuk mengukur kinerja perusahaan jika strategi tersebut telah diimplementasikan.

Dalam evaluasi dan control yang efektif, manajer harus mencari informasi yang jelas dan tidak bias dari bawahannya. Dari informasi tersebut dapat diketahui apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain itu, harus dipertimbangkan pula jenis pengendalian. Pengendalian dibangun dengan fokus pada kinerja actual, pada aktifitas yang menghasilkan kinerja, atau pada sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan kinerja. Pengendalian perilaku (*behaviour control*) mengkhususkan pada bagaimana sesuatu harus dikerjakan melalui kebijakan, aturan, standard prosedur dan operasi, dan perintah dari atasan. Pengendalian output (*output control*) mengkhususkan pada apa yang harus dicapai dengan focus pada hasil akhir dari perilaku melalui penggunaan target tujuan dan kinerja. Pengendalian input (*input control*) fokus

pada sumber daya, seperti pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai dan motif karyawan. (Rahman & Enny, 2017).

Chandler dalam (Salusu, 2015:64) untuk mencapai suatu proses pencapaian tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencana strategi yang perlu diperhatikan :

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

b. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya :

1. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum kepada segmen pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi politik pemuda dalam kegiatan demokrasi, serta pemuda merupakan pilar penting kesuksesan suatu wilayah sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan bangsa. Sosialisasi ini dengan sasaran yaitu meliputi remaja SMA/SMK dan masyarakat umum yang baru memasuki usia 17 tahun secara pengalaman dan pemahaman masih sangat minim karena mereka belum pernah mengikuti pilkada sebelumnya sehingga segmen ini sangat penting untuk dilakukan sosialisasi karena secara kuantitas pemilih pemula terbilang cukup banyak.

2. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum pada segmen mahasiswa, komisi pemilihan umum memang sudah menjadi agenda pihaknya untuk memberikan edukasi kepada calon pemilih di kalangan mahasiswa. Mereka dianggap sebagai agen perubahan yang nantinya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan mereka dengan bijak, melalui adanya sosialisasi, diharapkan mahasiswa dapat menyampaikan kepada masyarakat agar mereka terdidik dan tersadarkan secara sukarela dalam menggunakan hak suara dan tentunya agar menjadi pemilih yang cerdas.

c. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini cenderung mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada dan panitia *ad hoc* yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pilkada untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan akan dikerjakan.

## **2.2 Partisipasi Politik**

Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi tentang partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir pada masa pasca-industrial (*post industrial*) dan

dilamakan gerakan sosial baru (*new social movement*) . kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapa akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Menurut Ramlan Surbakti (1992) Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain: mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternative pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Herbert McClosky (1972 :252) seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (*the term political participation will refer to those voluntary*

*activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy).*

Dalam hubungannya dengan negara-negara baru, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No easy choice: Political participation in developing countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (*by political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustanic or sporadic, peacefull or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui

kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*). (Budiarjo, 2008)

Partisipasi yang sifatnya mobilisasi atau penggerahan biasanya terjadi apabila elit politik mengadakan upaya untuk melibatkan massa ke dalam aktivitas-aktivitas politik. Partisipasi politik yang bersifat mandiri atau sukarela terjadi apabila elit politik hanya menganjurkan atau menghimbau agar massa melakukan aktivitas-aktivitas politik. Dalam model partisipasi politik yang sifatnya mandiri, elit tidak punya kemampuan dan kemauan untuk melakukan tindakan represif atau agar massa melakukan aktivitas-aktivitas politik.

Perubahan sifat partisipasi politik dari mandiri ke mobilisasi ataupun sebaliknya, dari mobilisasi ke mandiri sangat dimungkinkan tergantung pada perubahan-perubahan dalam susunan elit dan tujuan yang akan dicapainya. Perubahan sifat partisipasi dapat terjadi karena elit yang berkuasa mengubah sifatnya terhadap partisipasi itu sendiri. Hal lain yang dapat terjadi apabila elit yang berkuasa ditentang atau akan diganti oleh elit lain yang mempunyai sikap berbeda terhadap partisipasi. (Haryanto, 2017).

Piramida partisipasi politik, sebagaimana disampaikan oleh David F Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori:

- a. aktivis (*activists*)

*the deviant* (termasuk di dalamnya pembunuhan dengan maksud politik, pembajak, dan teroris);

pejabat public atau calon pejabat public; fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.

b. partisipan (*participants*)

orang yang bekerja untuk kampanye; anggota partai secara aktif; partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis; orang yang terlibat dalam komunitas proyek.

c. penonton (*onlookers*)

orang yang menghadiri reli-reli politik; anggota dalam kelompok kepentingan; *pe-lobby*; pemilih; orang yang terlibat dalam diskusi politik; pemerhati dalam pembangunan politik.

d. apolitis (*apoliticals*)

orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya

### **Tipologi Partisipasi Politik**

Menurut Ramlan Surbakti (1992) partisipasi sebagai kegiatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Partisipasi Aktif

Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

## 2. Partisipasi Pasif

Kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

### **Faktor-faktor Partisipasi Politik**

Menurut Milbrath dalam Maran (2007:156) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong partisipasi politik, yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Lima faktor utama yang mendukung partisipasi politik antara lain :

#### 1. Sejauh mana orang menerima pemahaman tentang politik.

Karena adanya pemahaman tentang politik, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal dan informal.

#### 2. Faktor karakteristik pribadi seseorang.

Orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya aktif terlibat dalam aktivitas partisipasi politik.

#### 3. Karakteristik sosial

Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama juga mempengaruhi persepsi dan sikap perilaku seseorang dalam ranah politik. Hal ini membuat seseorang mau ikut terlibat dalam partisipasi politik.

4. Situasi atau lingkungan politik itu sendiri.

Lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas represifitas dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

5. Pendidikan politik.

Variabel ini juga cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kesadaran dalam berpartisipasi sebagai tonggak dalam demokrasi serta edukasi politik yang berkualitas membuat masyarakat lebih antusias berpartisipasi dalam ranah politik.

Selain faktor pendukung, Primadha Sukma Nur Wardana (2018:61) menyebutkan 3 faktor yang dapat menjadi penghambat partisipasi politik pemilih pemula, antara lain:

1. Kesibukan kegiatan sehari-hari.

Tuntutan sebagai pelajar dan bekerja menjadi alasan utama bagi para pemilih pemula enggan melakukan kegiatannya di bidang politik. Peran pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan umum.

2. Perasaan Malu (Minder).

Minder ini biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau minimnya pengalaman dalam kegiatan politik maupun tingkat sosial dan ekonomi yang rendah.

### 3. Pengaruh Pihak Keluarga.

Pihak keluarga dapat mendukung atau bahkan menentang perilaku anggota keluarga yang lain. Biasanya hal tersebut diakibatkan budaya paternalisme.

Selain itu, eksistensi identitas juga sangat signifikan dalam persoalan partisipasi politik. Hal ini secara rinci dijelaskan oleh Suwondo (2005) dimana partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu :

Pertama, pendekatan sosiologis yang menekankan pentingnya peranan kelas terhadap preferensi seseorang. Pendekatan ini meyakini bahwa kelas merupakan basis pengelompokan politik, sebab partai-partai politik tumbuh dan berkembang berdasarkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang berlainan karena kepentingan ekonomi masing-masing. Misalnya, orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai “orang kecil” (wong cilik) akan memberikan suaranya kepada calon yang mempunyai *positioning* dengan cara mengidentifikasi dirinya seperti rakyat pemilih sebagai partai “wong cilik”, fenomena ini juga sering disebut sebagai populisme.

Kedua, pendekatan yang lebih memberikan penekanan kepada faktor psikologis dari pemilih. Misalnya keterikatan dalam agama, ras, etnis atau hal yang menstimulus seseorang secara emosional.

### **2.3 Pemilih Pemula**

UU No. 10 tahun 2008 BAB IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.

### **Karakteristik Pemilih Pemula**

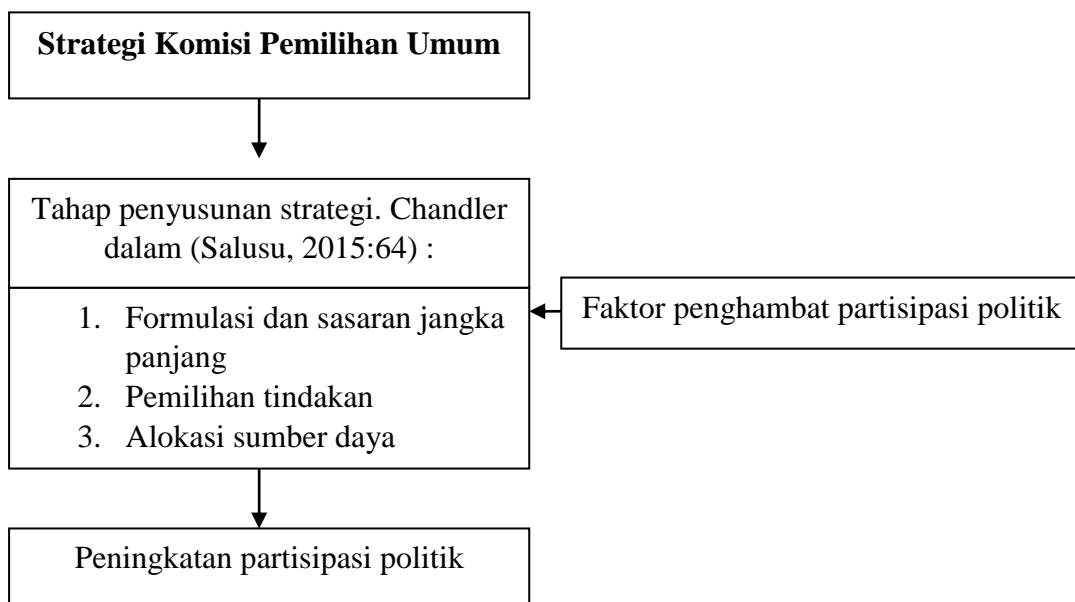
Karakteristik pemilih pemula dalam (Firman, 2014) mengemukakan bahwa:

- a. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS
- b. Belum memiliki pengalaman memilih
- c. Memiliki antusiasme yang tinggi
- d. Kurang rasional
- e. Masih penuh gejolak dan semangat yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial dalam pemilu.
- f. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba dan berpartisipasi dalam pemilu meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Karakteristik sikap pemilih pemula yang fleksibel dijelaskan oleh Rush dan Althoff (1983:35-38) sebagai akibat dari pengaruh agen-agen sosialisasi politik terhadap dirinya yang meliputi keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, keadaan sistem politik dan media massa.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menggambarkan kerangka pemikiran mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara:



*Gambar 2. Kerangka Pikir*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun rencananya penelitian ini akan dilakukan kurang lebih tiga (3) bulan.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu yang mendalam dalam bentuk narasi.

##### 3.2.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif untuk bagaimana kemudian mendeskripsikan suatu objek atau *setting social* suatu tulisan yang sifatnya naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Pendeskripsiannya sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa, bagaimana suatu kejadian terjadi.

Dalam membuat suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk kemudian memberikan ilustrasi utuh dan juga dapat memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif relevan dan cocok digunakan untuk penelitian ini. Yaitu untuk mendapatkan fakta/data tentang “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

### **3.2.2 Fokus Penelitian**

Dalam konteks penelitian kualitatif, diperlukan adanya fokus kajian yang merupakan akumulasi dari hasil permasalahan-permasalahan awal yang ditemukan guna memperjelas arah, serta inti dari penelitian seorang peneliti. Oleh karena itu yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

- a. Tahap penyusunan strategi. Chandler dalam (Salusu, 2015:64) :

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa dimana KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan tujuan strategi serta merancang sebuah strategi agar tingkat partisipasi pemilih meningkat terutama di kalangan pemilih pemula.

2. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi kepada beberapa segmen pemilih dan bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya serta berbagai metode yang digunakan.

3. Alokasi sumber daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis. Dalam tahap ini KPU melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya

memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada.

b. Faktor Penghambat Partisipasi Politik

Penelitian ini juga berfokus pada hambatan-hambatan yang seringkali ditemukan pada segmen pemilih pemula dalam hal partisipasi politik baik partisipasi yang bersifat aktif maupun pasif.

**3.2.3 Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang bisa memberikan informasi, situasi dan keadaan latar penelitian. Untuk mendapatkan data secara representatif, maka diperlukan informasi kunci yang mengetahui dan memiliki kaitan dengan persoalan yang sedang dikaji.

Berikut daftar informan dalam penelitian ini :

| No | Informan                                                                                          | Jumlah  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara                                                       | 1 orang |
| 2  | Komisioner divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | 1 orang |
| 3  | Pemilih Pemula                                                                                    | 1 orang |
| 4  | Mahasiswa                                                                                         | 1 orang |
| 5  | Relawan Demokrasi                                                                                 | 1 orang |

|                 |              |         |
|-----------------|--------------|---------|
| 6               | Tokoh Pemuda | 1 orang |
| 7               | Siswa SMA    | 1 orang |
| Jumlah Informan |              | 7 orang |

*Tabel 3.2.3 : Informan penelitian*

### **3.2.4 Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang kemudian diungkapkan dalam penelitian yang bersifat skematik, narasi dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subjek yang diamati di lapangan juga dijadikan data untuk pengumpulan hasil penelitian yang kemudian dapat dilihat atau di deskripsikan sebagai berikut :

- a. Rekaman audio. Untuk merekam pembicaraan antara peneliti dengan informan guna mendapatkan bukti penelitian.
- b. Dokumentasi/foto. Studi dokumentasi ialah terutama mengenai akurasi yang tepat mengenai sumber dokumen, bermanfaat sebagai bukti penelitian, dan sesuai dengan standard kualitatif, tidak reaktif.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dimiliki oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan masyarakat sebagai data pendukung dalam penelitian yang dapat melengkapi data primer.

### 3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang harus dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Observasi.

Menurut Bungin (2007:115), observasi adalah metode pengumpulan data yang kemudian digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Teknik ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti guna menghasilkan keterangan yang berupa informasi, data serta fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang objek yang akan menjadi bahan penelitian dengan cara tanya jawab secara lebih rinci dan terbuka dengan langsung kepada informan/responden. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan yang akan diwawancara kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur, baik berupa buku-buku, hasil penelitian yang relevan, majalah, Koran dan dokumen-

dokumen tertulis sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **3.2.6 Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif.

Dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif (*interactive model analysis*) menurut Miles dan Humberman diterjemahkan oleh (Tjetjep Rohendi 1992) yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

#### **1. Pengumpulan data (*data collection*)**

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen berbentuk *soft copy* serta melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten.

#### **2. Reduksi data**

Data yang didapatkan dari lokasi penelitian tersebut kemudian di reduksi oleh peneliti yang di fokuskan dalam hal-hal penting. Proses reduksi data dapat berlangsung selama penelitian masih dilakukan.

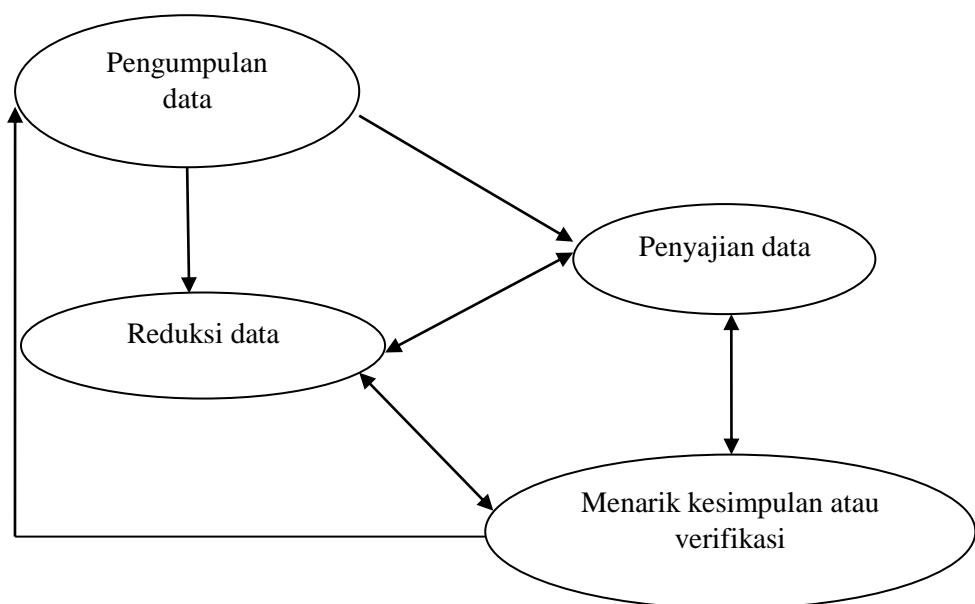
#### **3. Penyajian data**

Data yang telah dipilih dan diatur menurut kelompok data serta dengan berbagai macam kategori data yang kemudian diselaraskan dengan permasalahan yang ada. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan hasil penelitian itu sendiri.

#### **4. Menara kesimpulan**

Kegiatan ini merupakan suatu proses untuk menarik kesimpulan dari kategori data yang telah di reduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir.

Komponen analisa data model interaktif diatas dapat dilihat pada gambar berikut :



*Gambar 3. Komponen dalam analisis data : Model interaktif*

*Sumber :* Miles dan Humberman diterjemahkan oleh (Tjetjep Rohendi 1992)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Karakteristik Objek Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow utara merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemekaran kabupaten ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki akronim atau sebutan lain yang sering digunakan oleh masyarakat diantaranya yakni: Bolmut, Bolmong Utara, Binadow (usulan nama awal kabupaten ketika pemekaran yang merupakan akronim dari Bi= Bolangitang, Na= Bintauna, dan Dow= nama kuno dari kata Kaidipang) dan yang terakhir adalah Bulango Mongonu Utara (merupakan gabungan dari bahasa adat Bintauna, Bolangitang, dan Kaidipang yang biasanya digunakan dalam upacara adat).

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari enam kecamatan, yaitu : kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub. Banyaknya penduduk Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo ini, berjumlah 83.112 jiwa per tahun 2020.

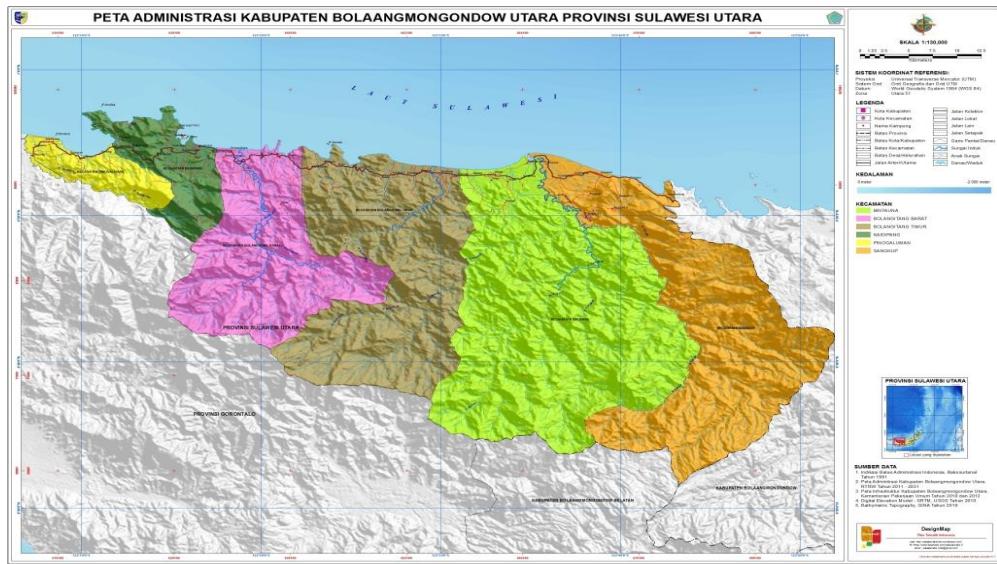
| No.          | Nama Kecamatan    | Jumlah Kelurahan/Desa |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1            | Bintauna          | 16                    |
| 2            | Bolangitang Barat | 18                    |
| 3            | Bolangitang Timur | 20                    |
| 4            | Kaidipang         | 15                    |
| 5            | Pinogaluman       | 22                    |
| 6            | Sangkub           | 16                    |
| <b>Total</b> |                   | <b>107</b>            |

Table 4.1.1 : Daftar kecamatan dan jumlah kelurahan/desa di Bolaang Mongondow Utara

### 4.1.2 Luas dan Batas Wilayah

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 kecamatan, 106 desa, dan 1 kelurahan dengan luas wilayah darat mencapai 1.856,86 km<sup>2</sup>.
- b. Secara astronomis kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak pada 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:
  1. Sebelah utara berbatasan dengan laut Sulawesi.
  2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Posaigadan (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)
  3. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sang Tombolang (Kabupaten Bolaang Mongondow)
  4. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Atinggola (Kabupaten Gorontalo Utara)

Untuk lebih jelasnya peta administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



*Gambar 4.1.2 : peta administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*

### 4.1.3 Visi dan Misi

a. Visi

“Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”.

**b. Misi**

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya;
  2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and clean government*);
  3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;

4. Memantapkan pemetaan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

#### **4.1.4 Deskripsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat, maka Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serantak pada 9 Desember 2020 yang dalam hal ini adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKKP pada hari Rabu, 27 Mei 2020.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3: Olly Dodokambey dan Steven Kandouw dengan perolehan 821.503 suara, disusul dengan pasangan nomor urut 1: Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar dengan perolehan 491.457 suara, serta pasangan nomor urut 2 Vonne Anneke Panambunan dan Hendry Corneles Mamengko Rontuwene dengan perolehan suara 125.627 suara.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sendiri, suara terbanyak diperoleh pasangan nomor urut 1 dengan perolehan 26.451 suara, disusul pasangan nomor urut 3 dengan perolehan 20.222 suara lalu pasangan nomor urut 2 dengan perolehan 3.589 suara.

Untuk lebih jelasnya berikut rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulewesi

Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 15 Oktober 2020:

**Provinsi : Sulawesi Utara**

**Kabupaten : Bolaang Mongondow Utara**

| NO           | NAMA KECAMATAN    | JUMLAH DESA/ KEL | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |               |               |
|--------------|-------------------|------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|              |                   |                  |            | L              | P             | L + P         |
| 1            | SANGKUB           | 16               | 23         | 3.742          | 3.580         | <b>7.322</b>  |
| 2            | BINTAUNA          | 16               | 30         | 5.313          | 5.043         | <b>10.356</b> |
| 3            | BOLANGITANG TIMUR | 20               | 31         | 5.438          | 5.125         | <b>10.563</b> |
| 4            | BOLANGITANG BARAT | 18               | 34         | 5.815          | 5.505         | <b>11.320</b> |
| 5            | KAIDIPANG         | 15               | 29         | 4.959          | 4.867         | <b>9.826</b>  |
| 6            | PINO GALUMAN      | 22               | 24         | 4.201          | 4.083         | <b>8.284</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>107</b>       | <b>171</b> | <b>29.468</b>  | <b>28.203</b> | <b>57.671</b> |

Boroko, 15 Oktober 2020

*Tabel 4.1.4 : rekapitulasi daftar pemilih tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulewesi Utara Tahun 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*

#### **4.1.5 Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Dalam proses penyelenggaraaan Pemilihan Umum di Indonesia, tentu diperlukan sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, serta Kabupaten/Kota.

Sehingga itu dibentuklah Komisi Pemilihan Umum sebagai sebuah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia.

#### **a. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai sejak tahun 1946. Setelah Presiden pertama di Indonesia, Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

- Panitia Pemilihan Indonesia

Setelah revolusi kemerdekaan pada 7 November 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia Pemilihan Indonesia bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- Lembaga Pemilihan Umum

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970.

- KPU Periode 1999-2001

Di masa pemerintahan BJ Habibie inilah awal Komisi Pemilihan Umum di Indonesia dibentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999.

Anggota-anggota KPU pada awalnya terdiri dari anggota sebuah Partai Politik, tetapi setelah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisan.

- KPU Periode 2001-2007

Di era Presiden Abdurrahman Wahid, perombakan struktur KPU melalui Keppres No. 70 Tahun 2001. Sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di era pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang menjadi 11 orang saja. Anggota KPU terdiri dari unsur LSM dan Akademisi.

Di era presiden Megawati Soekarnoputri, dilakukan pembentukan tim seleksi anggota KPU. Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU pasca perbaikan struktur KPU era Presiden Abdurrahman Wahid.

- KPU Periode 2007-2017

KPU periode 2007-2012 ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota. KPU yang ketiga ini

dilantik oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Oktober 2012. Lalu pada tanggal 12 April 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 7 anggota KPU bersama 5 anggota Bawaslu. Pelantikan anggota KPU periode 2012-2017 ini didasarkan pada Keppres No. 34/P/tahun 2012.

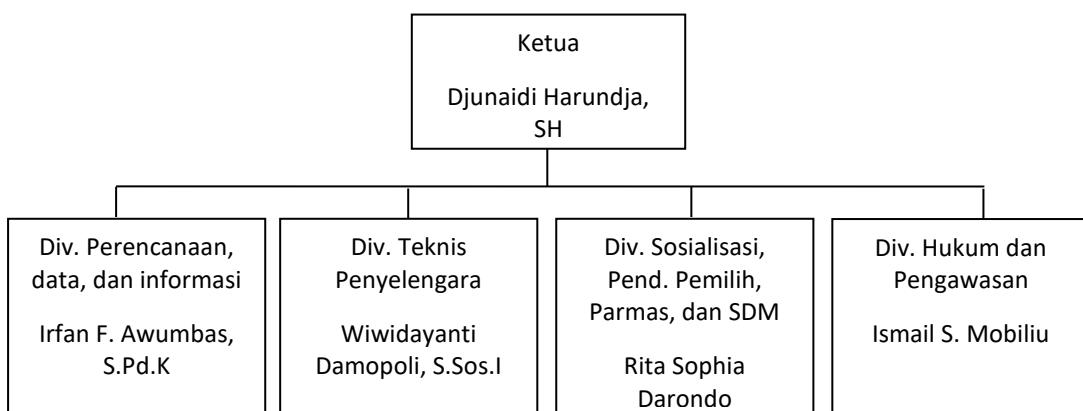
- KPU Periode 2017-2022

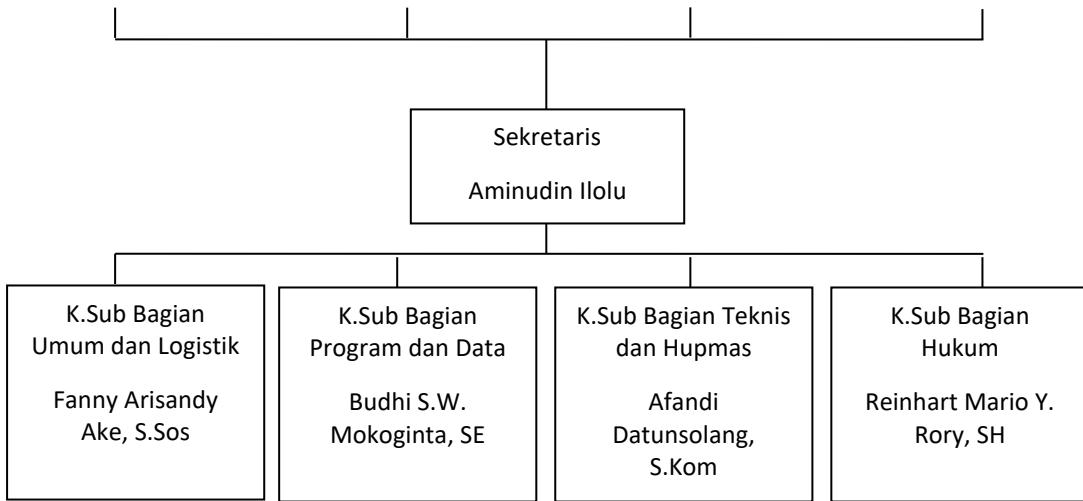
Berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2017, Presiden Joko Widodo melantik 7 orang Komisioner KPU pada 11 April 2017 yang bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2019.

**b. Bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Peraturan umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berikut struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020:





4.1.5 : Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

**c. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

**- Visi**

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas, demi Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”.

**- Misi**

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Professional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

**d. Pemilih Pemula Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

UU No. 10 tahun 2008 BAB IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.

Pemilih pemula merupakan masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Berusia 17 tahun
- b. Sudah/pernah kawin
- c. Purnawirawan/sudah tidak terikat lagi dalam keanggotaan TNI/Kepolisian

Di Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri, pemilih pemula merupakan salah satu segmen yang secara signifikan

mempengaruhi seberapa besar tingkat partisipasi dalam Pemilihan Umum.

Berikut rekapitulasi jumlah Pemilih Pemula di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020:

| No.          | Kecamatan         | Pemilih Pemula |            | Total        |
|--------------|-------------------|----------------|------------|--------------|
|              |                   | L              | P          |              |
| 1            | SANGKUB           | 123            | 130        | 253          |
| 2            | BINTAUNA          | 164            | 150        | 314          |
| 3            | BOLANGITANG TIMUR | 189            | 169        | 358          |
| 4            | BOLANGITANG BARAT | 197            | 177        | 374          |
| 5            | KAIDIPANG         | 177            | 144        | 321          |
| 6            | PINO GALUMAN      | 136            | 135        | 271          |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>986</b>     | <b>905</b> | <b>1.891</b> |

*Tabel 4.1.5 : rekapitulasi jumlah pemilih pemula Pilgub 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*

## 4.2 Hasil Penelitian

Pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdapat 171 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 6 Kecamatan di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula serta apa saja faktor penghambat partisipasi pemilih pemula. Penulis menggunakan teori yang dirumuskan Chandler, tahap perumusan strategi yaitu :

formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya.

#### **4.2.1 Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula**

##### **a. Formulasi dan sasaran jangka panjang**

Untuk menyusun sebuah formulasi, KPU sebagai sebuah lembaga yang bersifat Nasional tentu saja mengikuti arahan serta regulasi yang sudah ditetapkan secara terpusat, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Djunaidi Harundja selaku Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada sesi wawancara :

“Terkait dengan langkah-langkah KPU Bolaang Mongondow utara dalam strategi peningkatan partisipasi pemilih jadi sebagaimana kerja-kerja kami secara hirarki tentunya kami KPU kabupaten/kota sebagai implementator dari regulasi yang dibuat oleh pimpinan kami secara berjenjang baik di provinsi maupun KPU RI kami kemudian menjabarkan kemudian mengimplementasikan semua itu di tataran lapangan”.(*wawancara Senin, 21 Maret 2022*)

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dirancang secara regulatif serta memiliki *planning* yang jelas, hal itu dikarenakan regulasi yang disusun bersifat derivatif. Dari perencanaan yang solid tersebut tentunya akan memudahkan kerja-kerja KPU dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain itu, dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merumuskan berbagai macam strategi, dalam hal ini program relawan demokrasi seperti yang ditemukan dari hasil wawancara Ibu Rita Sophia Darondo selaku Komisioner divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia :

“untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak konstitusinya, selain dibantu oleh badan *ad-hoc*, juga di KPU sendiri membentuk yang namanya relawan demokrasi. Jadi, relawan demokrasi itu menyisir 11 basis diantaranya pemilih pemula”. (*wawancara Selasa, 15 Maret 2022*)

Berdasarkan wawancara tersebut, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun sebuah strategi dengan membentuk relawan demokrasi untuk mendukung kerja KPU dalam memberikan sosialisasi tentang pemilu kepada masyarakat serta memberikan edukasi politik agar masyarakat terutama segmen pemilih pemula serta berbagai macam lapisan masyarakat lainnya dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Untuk itu, karena program tersebut merupakan program relawanisasi, pihak KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan kesempatan kepada masyarakat secara umum untuk turut bergabung dan ikut berpartisipasi mengingat ihwal penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai salah satu perwujudan dari sistem demokrasi itu sendiri merupakan keharusan kita bersama sebagai masyarakat yang mendambakan keberlangsungan iklim demokrasi yang baik.

KPU juga dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah tentu memiliki dasar hukum yang mengatur seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta regulasi-regulasi turunannya yang menjadikan KPU sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Selain itu, Ibu Rita Sophia Darondo juga menambahkan :

“Dari pembentukan relasi (relawan demokrasi) itu tentu outputnya diharapkan peningkatan partisipasi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas”.(wawancara Selasa, 15 Maret 2022)

Hal ini menunjukkan bahwa target yang disasar KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 sendiri tidak terbatas pada peningkatan partisipasi secara kalkulatif saja melainkan juga peningkatan tingkat kesadaran masyarakat (*awareness*) tentang politik itu sendiri, apalagi dua hal tersebut terkadang tidak mengalami peningkatan secara simultan mengingat kesadaran politik adalah salah satu indikator yang sukar untuk diukur.

Mengenai sasaran jangka panjang, Ibu Rita Sophia Darondo mengungkapkan :

“Karena saya juga divisinya pendidikan pemilih, jadi divisi pendidikan pemilih itu sasarannya jangka panjang, jadi bagaimana memberikan pemahaman sejak dini kepada calon pemilih bahkan masih di tingkat PAUD untuk mengenalkan mereka bagaimana proses demokrasi itu serta pengenalan atribut-atribut kepemiluan itu juga gencar dilakukan oleh KPU”.(wawancara Selasa, 15 Maret 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam memberikan edukasi tidak hanya menyasar kalangan masyarakat pemilih saja, melainkan juga kalangan anak-anak. Orientasi tersebut tentunya akan menstimulus pola pikir anak walaupun tidak seperti segmen masyarakat pemilih tetapi hal tersebut dapat menjadi bekal yang penting kedepannya.

#### **b. Pemilihan tindakan**

Pemilihan tindakan merupakan sebuah tahapan dimana KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menentukan bagaimana kegiatan sosialisasi dilaksanakan serta target subjek sosialisasi tersebut, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara Ibu Rita Sophia Darondo :

“Dari 11 basis relawan demokrasi yang dibentuk itu ada sekitar 55 orang, jadi tiap basis 5 orang yang lingkup kerjanya itu se-kabupaten. mulai dari segmen pemilih pemula, perempuan, agama, komunitas, lingkungan, warganet, pemuda, keluarga, lalu difabel, lansia, ada kaum marginal juga yang kemudian melakukan sosialisasi di tiap-tiap basis tersebut”.(*wawancara Selasa, 15 Maret 2022*)

Dari penuturan Ibu Rita Sophia Darondo selaku Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat tersebut program relawan demokrasi (Relasi) dibentuk berdasarkan eksistensi berbagai segmen pemilih dalam masyarakat. Sehingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga diwakili oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

Khusus untuk segmen pemilih pemula, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menyisir sekolah-sekolah yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti yang diutarakan Bapak Febriyanto Van Solang sebagai salah satu relawan demokrasi :

“Jadi relawan demokrasi itu turun ke sekolah memberikan sosialisasi kepada pelajar apalagi mereka kan pemilih pemula jadi kami memberikan pengenalan serta penjelasan tentang pemilu”.(*wawancara Selasa, 5 April 2022*)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan ibu Rita Sophia Darondo :

“Karena yang akan menjadi pemilih pemula itu tidak hanya siswa SMA saja, KPU juga selain menyisir sekolah-sekolah Madrasah Aliyah maupun SMA, kami juga turun ke SMP dan MTS untuk memberikan sosialisasi kepada mereka”.(*wawancara Selasa, 15 Maret 2022*)

Upaya yang dilakukan KPU tersebut merupakan sebuah langkah untuk meningkatkan partisipasi di kalangan pemilih pemula itu sendiri, hal tersebut dibuktikan dengan program *go to school* yang tidak hanya dilaksanakan di lingkup SMA dan MA saja melainkan juga dimulai dari tingkat SMP dan MTS. Selain itu KPU juga membangun jaringan komunikasi yang bersifat kelembagaan seperti dinas pendidikan dan kementerian agama yang membawahi sekolah dan Madrasah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga program tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, KPU juga kerap kali mengalami berbagai macam kendala, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Djunaidi Harundja selaku ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara :

“Jika kemudian ada hal-hal yang memiliki kendala di lapangan, tentunya kami mencari jalan keluarnya seperti apa, apalagi karena masa pandemi tentunya kami intens sosialisasi di media sosial lewat aplikasi zoom”.(wawancara Senin, 21 Maret 2022)

Beliau juga menambahkan :

“Karena masa pandemi kami tentunya pada desa-desa yang tidak dijangkau dengan jaringan, kami datangi untuk dibuatkan satu tempat kemudian bisa gabung di link zoom tapi dibatasi”(wawancara Senin, 21 Maret 2022)

Dari kendala-kendala yang ditemukan dilapangan, KPU melakukan berbagai macam penyesuaian apalagi diketahui bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 tersebut bertepatan dengan awal mula penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi permasalahan urgen yang harus diselesaikan mengingat pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2020 tersebut adalah salah satu agenda

penting yang mesti dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menyesuaikan situasi pandemic tersebut dengan melaksanakan pemilu taat prokes, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Rita Sophia Darondo :

“KPU sebagai lembaga yang diberi hak menyelenggarakan pemilu harus juga melaksanakan tahapan dengan bagaimana membuat masyarakat yakin untuk datang ke TPS tanpa takut dengan covid, otomatis butuh penyesuaian melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, bahkan pada saat pelaksanaan pilgub kemarin semua badan *ad-hoc* itu dilindungi dengan prokes, mulai dari baju hazmat, pengaturan di tps, begitu juga jam kedatangan”.(wawancara Selasa, 15 Maret 2022)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjalankan tahapan-tahapan pemilu tersebut sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat melalui surat edaran dari KPU RI mengingat pada saat itu juga merupakan penyelenggaraan PILKADA serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, serta 37 Kota yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Selain melaksanakan sosialisasi sesuai dengan program yang sudah terjadwal, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga sering melakukan sosialisasi di tempat-tempat strategis yang didatangi oleh masyarakat seperti yang ditemukan pada wawancara Bapak Djunaidi Harundja selaku Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara :

“saya di setiap pesta-pesta maupun aqiqah yang ada di daerah kita tercinta ini karena masih sangat didominasi oleh kultur budaya yang lokal, sehingga saya komunikasinya sampai ke bupati, camat atau sangadi itu meminta waktu disetiap seusai makan siang atau makan malam kami KPU jika hadir di pesta-pesta itu diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan

sosialisasi yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih sekaligus juga edukasi kepada pemilih". (*wawancara Senin, 21 Maret 2022*)

Dari hasil wawancara tersebut, KPU seringkali memanfaatkan acara atau pesta-pesta rakyat sebagai media untuk menyampaikan serta memberikan edukasi kepada pemilih, apalagi acara-acara seperti itu biasanya dihadiri berbagai lapisan masyarakat yang juga merupakan subjek sosialisasi oleh KPU itu sendiri.

Tak hanya program sosialisasi, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga melakukan simulasi pemilihan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rita Sophia Darondo :

“simulasi itu biasanya dilakukan H-3. Kemarin untuk Pilgub itu di lakukan di tiap kecamatan di lokus-lokus yang berbeda yang intinya lebih mendekatkan pelayanan dan informasi kepada masyarakat”(*wawancara Selasa, 15 Maret 2022*)

Tidak berbeda jauh dengan kegiatan sosialisasi, kegiatan simulasi juga merupakan hal penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi masyarakat pemilih yang masih minim akan pengetahuan tentang pemilu apalagi tata cara dalam pencoblosan, karena tidak seluruh masyarakat juga bisa paham hanya lewat penyampaian saja, ada yang hanya bisa paham ketika melakukan praktik pencoblosan secara langsung sehingga kegiatan ini merupakan salah satu langkah penting yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### **c. Alokasi Sumber Daya**

Dalam alokasi sumber daya ini berhubungan dengan kemampuan dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dalam

meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk lebih jelasnya lagi berikut hasil wawancara bersama Ibu Rita Sophia Darondo selaku Divisi Sumber Daya :

“Sebelum turun relawan demokrasi itu diberikan bimtek, mereka kan juga harus diberi bekal supaya mereka tahu persis apa yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat. Di bimtek juga selain cara menyampaikan tentunya juga bagaimana mereka sebagai perpanjangan tangan dari KPU mempunyai atau memiliki *attitude* yang baik dan juga selalu menjaga integritas sebagai bagian dari KPU”(*wawancara Selasa, 15 Maret 2022*)

Sebagaimana hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan bimbingan teknis kepada para relawan demokrasi tentang bagaimana mekanisme dalam sosialisasi serta materi yang akan dibawa. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut juga dapat memahami apa yang disampaikan.

Tak cukup hanya memberikan pembobotan materi saja KPU juga membekali mereka dengan pembobotan moril mengingat hal yang dibutuhkan dalam sosialisasi bukan hal yang normatif saja melainkan juga pendekatan persuasif agar peserta sosialisasi merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Hal yang demikian juga disampaikan oleh Bapak Djunaidi Harindja selaku Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara :

“kami juga membekali sampai dengan mengantongi mereka dengan surat keputusan agar kerja-kerja mereka juga secara legalitas tidak diragukan lagi oleh public dan kita bingkai juga dengan bimtek dan arahan-arahan sebelum turun ke lapangan”.(*wawancara Senin, 21 Maret 2022*)

Selain pembekalan melalui bimbingan teknis, KPU juga memberikan surat keputusan kepada para relawan demokrasi mengingat relawan demokrasi

merupakan bagian dari KPU itu sendiri. Surat keputusan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mereka serta menghindari stigma buruk yang timbul dari para peserta sosialisasi.

Peran relawan demokrasi merupakan bagian sentral dalam kegiatan sosialisasi sehingga itu KPU sebagai lembaga yang mengakomodir hal tersebut juga memperhatikan kemampuan-kemampuan yang diperlukan mulai dari awal proses perekrutan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rita Sophia Darondo :

“Relawan demokrasi itu merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, khusus untuk segmen pemilih-pemula dari regulasi terakhir itu yang masih duduk di bangku SMA selagi dia mendapat surat rekomendasi dari kepala sekolah”(*wawancara Selasa, 15 Maret 2022*)

Dari penuturan tersebut, relawan demokrasi merupakan orang-orang yang telah melalui proses kualifikasi serta memiliki kemampuan dan pemahaman pada tiap-tiap segmen yang diwakilkan. Khusus relawan demokrasi pada segmen pemilih pemula, KPU memiliki kualifikasi tersendiri : berumur setidaknya 17 tahun; terdaftar sebagai siswa SMA/MA serta memiliki surat rekomendasi dari sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada para siswa yang ingin ikut berpartisipasi secara aktif dalam program-program KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih umum serta terkhusus untuk segmen pemilih pemula.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula**

Pemilih pemula merupakan salah satu segmen masyarakat pemilih yang memiliki rentang usia 17-21 tahun, dimana biasanya dalam hal partisipasi politik mereka rentan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Tentu saja faktor-faktor tersebut merupakan masalah utama Dalam upaya peningkatan tingkat partisipasi pemilih utamanya di kalangan pemilih pemula.

Sehingga itu, dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berikut faktor-faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula berdasarkan hasil wawancara beberapa informan :

**a. Kesibukan Kegiatan sehari-hari**

Sesuai dengan rentang usia, mayoritas pemilih pada segmen pemilih pemula teridentifikasi di kalangan pelajar, mulai dari siswa SMA, mashasiswa, sampai dengan pekerja muda yang biasanya memiliki kesibukan tersendiri seperti yang diutarakan oleh salah satu informan berikut ini :

“waktu pemilihan gubernur kemarin itu sementara sibuk kuliah lalu ditambah lagi ada covid, sedangkan untuk kemana-mana saja susah apalagi untuk balik ke bolmut”.(*wawancara dengan Abdul Rahmat Lakoro, mahasiswa. Kamis, 14 April 2022*)

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa rutinitas yang dilakukan di kalangan pelajar pada segmen pemilih pemula itu dianggap lebih urgen daripada penyelenggaraan pemilihan Gubernur yang dilakukan 5 tahun sekali itu. Dari anggapan tersebut Tentunya diharapkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih mengintensifkan lagi kegiatan sosialisasi dengan bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan yang berbasis kedaerahan agar para pelajar yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten dapat memahami pentingnya menggunakan hak suara pada penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu juga ada faktor yang secara situasional menghambat para pemilih sebagaimana yang

diketahui bahwa pada penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tersebut pandemi virus covid-19 itu mulai masuk ke Indonesia, sehingga pada situasi tersebut Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi daerah yang terindikasi masuknya virus covid-19.

### **b. Pengaruh Lingkungan Keluarga**

Dalam dinamika politik di Indonesia, keluarga menjadi salah satu determinan khususnya dalam hal partisipasi politik. Hal ini dikarenakan keluarga adalah lingkungan pertama dimana manusia tumbuh dan berkembang. Selain banyak pengaruh positif yang diberikan tentu juga lingkungan keluarga tersebut dapat menjadi faktor penghambat partisipasi pemilih entah secara kuantitas maupun kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu informan mengatakan :

“Karena saya tidak tahu calonnya itu seperti apa, jadi saya ikut orang tua saja, apa yang mereka pilih itu juga saya pilih”.(wawancara Mardan Talibandang, 19 tahun, Sabtu, 2 April 2022)

Mengenai peran keluarga Ibu Rita Sophia Darondo mengatakan :

“Apalagi untuk meyakinkan pemilih pemula untuk datang ke TPS, faktor keluarga itu sangat menjadi penentu karena diyakini keluarga sebagai komunitas terkecil di dalam masyarakat tentu juga memiliki peran yang tidak kecil dalam keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia”. (wawancara Selasa, 15 Maret 2022)

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa faktor keluarga dapat mempengaruhi partisipasi politik di kalangan pemilih pemula utamanya dalam konteks penentuan preferensi politik, dimana pemilih pemula dalam masalah ini biasanya cenderung mengikuti pilihan orang tua

mereka, hal tersebut tentunya dapat menghambat peningkatan kualitas partisipasi politik. Menjadi perhatian penting KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk meminimalisir masalah tersebut, sehingga dari 11 basis dalam program relawan demokrasi KPU tidak lupa menjadikan keluarga sebagai salah satu basis yang disasar dalam kegiatan sosialisasi.

### **c. Perasaan tidak mampu**

Perasaan tidak mampu atau minder juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat pemilih pemula berpartisipasi secara aktif pada penyelenggaraan pemilihan umum, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan :

“kalau saya tidak bisa kak, karena biasanya kalau untuk ikut memberikan sosialisasi sepertinya lebih cocok untuk orang-orang yang ikut organisasi seperti di osis, apalagi kan harus bisa berbicara di depan umum”(*wawancara Adit Pandri Alhasni Siswa SMAN 1 Pinogaluman, Sabtu 2 April 2022*)

Segmen pemilih pemula menjadi salah satu basis dalam pelaksanaan rekrutmen relawan demokrasi, dalam proses rekrutmen tersebut KPU memberikan kesempatan pada para siswa SMA/sederajat untuk ikut terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula, namun para pelajar yang menjadi sasaran dalam proses rekrutmen tersebut tidak merasa antusias bahkan cenderung merasa minder ketika diajak untuk ikut bergabung dalam program relawan demokrasi tersebut. Hal ini biasanya akibat dari kurangnya motivasi serta minimnya pengetahuan tentang politik yang diberikan kepada para pelajar tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ronal Latabi selaku Tokoh Pemuda bahwa:

“Hal yang menjadi faktor penghambat partisipasi pemilih pemula itu biasanya kurangnya materi-materi politik yang diberikan sehingga biasanya mereka berpikir suara mereka tidak menentukan, jadi apatis, pesimis”(*wawancara Kamis, 14 April 2022*)

Dari hasil wawancara tersebut memperjelas bahwa perasaan tidak mampu atau minder merupakan salah satu faktor penghambat pemilih pemula dalam berpartisipasi secara aktif pada penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga itu diharapkan juga agar KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan edukasi serta sekaligus meningkatkan motivasi pemilih khususnya dikalangan pemilih pemula.

#### **4.3 Pembahasan**

Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Pada formulasi dan sasaran jangka panjang KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun berbagai macam strategi dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih. KPU Kabupaten sebagai badan berbentuk hierarkis pada dasarnya mengikuti arahan yang diberikan oleh KPU RI serta KPU Provinsi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow utara membentuk/melaksanakan program relawan demokrasi yang terbagi menjadi 11 basis yang salah satunya adalah basis pemilih pemula. program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Juga

memberikan pemahaman serta pengenalan tentang atribut kepemiluan pada siswa mulai dari tingkatan PAUD.

## 2. Pemilihan tindakan

Relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan mitra kerja KPU dalam memberikan sosialisasi serta edukasi pada 11 basis masyarakat pemilih. Para relawan demokrasi tersebut turun ke berbagai basis salah satunya pemilih pemula yang kebanyakan masih duduk di bangku SMA/Sederajat untuk memberikan penjelasan serta pengenalan tentang pemilihan umum. Selain itu KPU serta relawan demokrasi juga menyisir SMP/Sederajat untuk memberikan sosialisasi serta edukasi kepada para calon pemilih, hal ini menjadi upaya preventif yang dilaksanakan KPU untuk mempersiapkan serta meningkatkan kualitas pemilih nantinya. Namun dalam pelaksanaannya KPU juga kerap kali mengalami kendala yang terjadi di lapangan, apalagi pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulut tahun 2020 tersebut pandemic virus Covid-19 mulai masuk di seluruh wilayah di indonesia sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi KPU juga menggunakan media sosial sebagai sarana menyampaikan penjelasan tentang pemilu kepada masyarakat. KPU juga melakukan simulasi pemilihan pada H-3 pemilihan.

## 3. Alokasi sumber daya

Dalam melakukan sosialisasi tentu diperlukan kemampuan dan pemahaman yang solid tentang pemilu serta segmen yang disasar. Dalam hal ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan Bimbingan Teknis kepada para relawan demokrasi. Di bimtek tersebut selain tentang bagaimana cara menyampaikan juga

tentang bagaimana memiliki *attitude* yang baik terhadap masyarakat. Selain itu, kpu juga membekali dan mengantongi mereka dengan surat kerja untuk meningkatkan kredibilitas terhadap masyarakat.

#### Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula

##### 1. Kesibukan kegiatan sehari-hari

Pemilih pemula umumnya masih memiliki status sebagai pelajar, mahasiswa dan pekerja muda. Kebanyakan pemilih pada segmen ini juga belum menyadari betul tentang batapa pentingnya menggunakan hak pilih, sehingga mereka cenderung bersikap acuh ketika pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu, tidak semua pemilih pemula berada di daerah pemilihan. Banyak juga pemilih yang menempuh studi di luar daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU ditambah pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 tersebut dibatasi oleh situasi pandemic covid-19 sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan regulasi tentang karantina wilayah, hal ini tentu saja membatasi ruang gerak para pemilih yang berada di luar daerah untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

##### 2. Pengaruh lingkungan keluarga

Pemilih pemula pada dasarnya merupakan segmen pemilih yang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya baik pengaruh positif maupun negatif. Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap seorang individu. Kurangnya pemahaman tentang politik pada segmen pemilih pemula tentu berimbang pada kebingungan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilih, hal ini dikarenakan lingkungan keluarga tidak

memberikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan hak politik secara mandiri sehingga pemilih pemula lebih memilih untuk mengikuti pilihan politik keluarganya. Berdasarkan temuan di lapangan, pemilih pemula pada keadaan tersebut cenderung mengikuti pilihan orang tuanya. Ketergantungan dan kecenderungan tersebut tentu saja mempengaruhi kualitas pemilu itu sendiri.

### 3. Perasaan tidak mampu

Perasaan tidak mampu ini biasanya muncul akibat dari kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi. Umumnya, segmen pemilih pemula merupakan segmen pemilih yang memiliki antusiasme yang besar apalagi para pelajar SMA/sederajat yang termasuk dalam golongan intelektual, rasa antusias tersebut muncul karena mereka merupakan segmen pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum, namun yang biasanya menjadi masalah adalah ketika rasa antusias tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan individu (*personal skill*) yang matang maka imbasnya adalah kurangnya rasa percaya diri untuk berpartisipasi pada kegiatan politik. Dalam kegiatan rekrutmen relawan demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, KPU memberikan kesempatan kepada segmen pemilih pemula untuk berpartisipasi secara aktif pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 namun berdasarkan hasil wawancara di lapangan, mereka cenderung memilih untuk tidak ikut dalam kegiatan semacam itu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam berorganisasi serta kemampuan *public speaking* yang rendah sehingga pemilih pemula merasa enggan untuk ikut pada kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan tentang bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilihat dari tiga indikator tahap penyusunan strategi yaitu yang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang. Tahap ini menunjukkan adanya kejelasan strategi yang digunakan serta apa sasaran dan output yang akan dicapai. Yang kedua, tahap pemilihan tindakan. Pada tahap ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjalankan program sosialisasi pada 11 basis masyarakat pemilih serta melakukan berbagai macam penyesuaian terhadap kendala-kendala yang seringkali terjadi di lapangan. Ketiga, alokasi sumber daya. Pada tahap ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan pembekalan terhadap para relawan demokrasi melalui bimbingan teknis serta mengantongi mereka dengan Surat Kerja untuk membangun kredibilitas terhadap masyarakat.
2. Faktor yang menghambat pemilih pemula dalam berpartisipasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yaitu: yang pertama, kesibukan kegiatan sehari-hari, kedua pengaruh lingkungan

keluarga, ketiga perasaan tidak mampu/minder, selain itu ada faktor situasional yang juga menjadi penghambat yang tidak lain adalah pandemi virus covid-19.

## 5.2 Saran

1. Dalam rangka pelaksanaan pemilu yang akan datang, disarankan agar KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hendaknya membangun kerja sama dengan organisasi mahasiswa berbasis kedaerahan agar program sosialisasi dan edukasi politik yang dilaksanakan juga dapat dijangkau pelajar/mahasiswa yang berada di luar daerah serta program sosialisasi seharusnya tidak hanya dilaksanakan pada saat Pemilihan Umum saja melainkan menjadi kegiatan reguler yang dilaksanakan setiap tahun.
2. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula baik secara kuantitas maupun kualitas maka disarankan agar KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kedepannya: 1). Dapat melaksanakan pelatihan atau *workshop* di bidang kepemiluan dalam rangka pemahaman dan edukasi kepada pemilih pemula dengan melibatkan pihak sekolah SMA/Sederajat, organisasi pemuda/karang taruna, serta mahasiswa guna menumbuhkembangkan partisipasi pemilih pemula dalam mewujudkan demokrasi, 2). Merekapitulasi tingkat partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang untuk mengetahui secara jelas efisiensi dari strategi yang diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gumilar, Y. (2019). Model Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Sosial Dan Politik* , 64.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa dan Kekuasaan; Suatu bahasan pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Polgow.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, D. S. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang.
- Maran, & Rafael, R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Moleong, & J., L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazarudin. (2018). *Manajemen Strategik*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Rahim, R., & Radjab, E. (2017). *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riduwan. (2018). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. (2018). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rusfiana, Y., & Nurdin, I. (2017). *Dinamika Politik Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu

Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun  
1999 Tentang Pemilu

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Pemilih Pemula

<https://tirto.id/jadwal-pilkada-serentak-9-desember-2020-pemerintah-dpr-kpu-sepakat-fDay>

<https://www.monitorsulut.com/2020/09/10/kpu-bolmut-sosialisasi-tahapan-penyelenggaraan-pilgub-sulut-2020-kepada-pemilih-berbasis-komunitas>

## **LAMPIRAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA**

##### **Responden:**

- 1. Ketua KPU**
- 2. Komisioner divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia**
- 3. Relawan Demokrasi**
- 4. Tokoh Pemuda**
- 5. Pemilih Pemula**
- 6. Siswa SMA**
- 7. Mahasiswa**

##### **- Tahapan Penyusunan Strategi**

##### **Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang**

1. Apakah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki Juknis/Juklak tentang strategi peningkatan partisipasi pemilih pemula?
2. Apakah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kewenangan dalam membangun jaringan komunikasi yang bersifat kelembagaan?
3. Apakah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki mitra kerja dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula?
4. Apakah langkah-langkah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam strategi peningkatan partisipasi pemilih?
5. Apakah formulasi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih dapat dilaksanakan dengan baik?

##### **Pemilihan Tindakan**

1. Apakah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki target subjek sosialisasi?
2. Apakah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pernah melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pemilih pemula?
3. Apakah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pernah melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pemilih tingkat mahasiswa

4. Apakah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pernah melakukan simulasi pemilihan terhadap pemilih tingkat pemula?
5. Apakah teknologi simulasi mendukung dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula?

### **Alokasi dan Sumber Daya**

1. Apakah pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kapasitas yang memadai dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih?
  2. Apakah pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan meningkatkan motivasi pemilih?
  3. Apakah pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki buku pedoman dalam meningkatkan partisipasi pemilih?
  4. Apakah buku pedoman tersebut dibagikan pada peserta sosialisasi?
  5. Darimanakah sumber anggaran yang digunakan untuk program sosialisasi?
  6. Apakah alokasi sumber daya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjang untuk program tersebut?
- **Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula**

1. Apa saja faktor penghambat partisipasi pemilih pemula?

## **DOKUMENTASI WAWANCARA**



Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Wawancara bersama Bapak Djunaidi Harundja, SH (*Senin, 21 Maret 2022*)

Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Wawancara bersama Ibu Rita Sophia Darondo (*Selasa, 15 Maret 2022*)  
Komisioner divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat  
dan Sumber Daya Manusia



Wawancara bersama Mardan Talibandang (*Sabtu, 2 April 2022*)  
Pemilih Pemula



Wawancara bersama Ronal Latabi (*Kamis, 14 April 2022*)

Tokoh Pemuda



Wawancara bersama Adit Pandri Alhasni (*Sabtu 2 April 2022*)

Siswa SMA



Wawancara bersama Abdul Rahmat Lakoro (*Kamis, 14 April 2022*)

Mahasiswa



Wawancara bersama Febriyanto Van Solang (*Selasa, 5 April 2022*)

Relawan Demokrasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Ahmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

**Nomor : 3608/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2022**

**Lampiran : -**

**Hal : Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth,**

Kepala KPU Bolaang Mongondow Utara

di,-

Tempat

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Bahri Adang Salhasim  
NIM : S2118018  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : KANTOR KPU BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Judul Penelitian : STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (STUDI KASUS PILGUB SULUT DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Jalan Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran Pemda Bolmut – Boroko Kec. Kaidipang 95765

Website : <https://kab-bolaangmongondowutara.kpu.go.id>

e-mail : [www.kab\\_bolmongut@kpu.go.id](mailto:www.kab_bolmongut@kpu.go.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 119 /TU.01.2/7108/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menerangkan bahwa :

Nama : Bahri Adang Salhasim  
NIM : S2118018  
Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di KPU Kabupaten Boalang Mongondow Utara dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Skripsi) dengan judul *"Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi Kasus Pilgub Sulut di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)"*.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boroko, 10 Mei 2022  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  
Ketua



DJUANDAIDI HARUNJDA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001  
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp ( 0435 ) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo**

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
Nomor : 088/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP  
NIDN : 0924076701  
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : BAHRI ADANG SALHASIM  
NIM : S2118018  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi Kasus : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **17%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,  
Dr. Arman, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0913078602

Gorontalo, 25 Mei 2022  
Tim Verifikasi,  
  
Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP  
NIDN. 0924076701

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## 17% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- 3% Publications database
- 17% Crossref database
- 0% Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database

---

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| Rank | Source                                 | Similarity (%) |
|------|----------------------------------------|----------------|
| 1    | <b>123dok.com</b>                      | <b>2%</b>      |
|      | Internet                               |                |
| 2    | <b>kab-tapanuliutara.kpu.go.id</b>     | <b>2%</b>      |
|      | Internet                               |                |
| 3    | <b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b>      | <b>2%</b>      |
|      | Internet                               |                |
| 4    | <b>core.ac.uk</b>                      | <b>1%</b>      |
|      | Internet                               |                |
| 5    | <b>genmuda.xyz</b>                     | <b>&lt;1%</b>  |
|      | Internet                               |                |
| 6    | <b>id.wikipedia.org</b>                | <b>&lt;1%</b>  |
|      | Internet                               |                |
| 7    | <b>repository.iaincreup.ac.id</b>      | <b>&lt;1%</b>  |
|      | Internet                               |                |
| 8    | <b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> | <b>&lt;1%</b>  |
|      | Internet                               |                |

|    |                             |     |
|----|-----------------------------|-----|
| 9  | media.neliti.com            | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 10 | kab-acehbarat.kpu.go.id     | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 11 | kpu-tapselkab.go.id         | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 12 | repository.radenintan.ac.id | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 13 | bawaslu.go.id               | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 14 | lib.unnes.ac.id             | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 15 | repository.ummat.ac.id      | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 16 | repository.uinbanten.ac.id  | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 17 | fr.slideshare.net           | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 18 | ejournal.unsrat.ac.id       | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 19 | text-id.123dok.com          | <1% |
|    | Internet                    |     |
| 20 | bolmutkab.go.id             | <1% |
|    | Internet                    |     |

|    |                 |                                |
|----|-----------------|--------------------------------|
| 21 | repo.apmd.ac.id | <1%                            |
| 22 | Internet        | docplayer.info                 |
| 23 | Internet        | scribd.com                     |
| 24 | Internet        | e-campus.iainbukittinggi.ac.id |

## ABSTRAK

### **BAHRI ADANG SALHASIM, S2118018. STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (STUDI KASUS: PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2) faktor penghambat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melelui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Komisioner divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; pemilih pemula; mahasiswa; relawan demokrasi; tokoh pemuda; dan siswa SMA. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi; wawancara; dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula cukup efektif. Hal ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh informan tentang tahap penyusunan strategi yang terdiri dari formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan timak dan alokasi sumber daya walaupun ada beberapa kendala yang menghambat partisipasi tersebut seperti kesibukan kegiatan sehari-hari, pengaruh lingkungan keluarga dan perasaan tidak mampu.

Kata kunci: strategi, KPU, partisipasi, pemilih pemula



## ABSTRACT

### ***BAHRI ADANG SALHASIM. S2118018. THE STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN INCREASING THE BEGINNER VOTER PARTICIPATION (A CASE STUDY: 2020 ELECTION OF GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF NORTH SULAWESI IN THE NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT)***

*This study aims to determine 1) the strategy of the General Elections Commission in increasing the Beginner Voters' participation in the 2020 North Sulawesi Governor and Vice Governor Elections in North Bolaang Mongondow District, 2) the inhibiting factors for the Beginner Voters' participation in the 2020 North Sulawesi Governor and Vice Governor election in the North Bolaang Mongondow District. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive presentation. The informants in this study consist of the chairman of the General Election Commission for North Bolaang Mongondow District, Commissioner of the Division of Socialization, Voter Education, Community Participation, and Human Resources, covering beginner voters (students, democracy volunteers, youth leaders, and high school students). Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. In this study, interactive analysis is used. The results of this study indicate that the strategy used by the General Election Commission in increasing the Beginner Voters' participation is quite effective. It is proven by the informants' opinions expressed about the strategy formulation stage consisting of formulation and long-term goals, selection of actions, and allocation of resources. Though so, several obstacles hinder their participation such as busy daily activities and the influence of the family environment, and feelings of inadequacy.*

*Keywords:* strategy, General Election Commission, participation, beginner voters



## **CURICULUM VITAE**

Nama : Bahri Adang Salhasim  
NIM : S2118018  
Tempat, tanggal lahir : Sidodadi, 10 Februari 2001  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Nama Orangtua

Ayah : Warman Adang Salhasim  
Ibu : Karsum Abusaman

Saudara Kandung

Kakak : Yayah Darlia Adang Salhasim

Riwayat Pendidikan

| NO | TAHUN     | JENJANG                | TEMPAT               | KET.      |
|----|-----------|------------------------|----------------------|-----------|
| 1  | 2006-2012 | SDN 1 Batubantayo      | Kec. Pinogaluman     | Berijazah |
| 2  | 2012-2015 | SMPN 1 Atinggola       | Kec. Atinggola       | Berijazah |
| 3  | 2015-2018 | SMAN 1 Gorontalo Utara | Kab. Gorontalo Utara | Berijazah |